

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI DALAM UPAYA PENGELOLAAN NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BEKASI

Muhammad Iqbal¹, Dahyar Daraba² & Etin Indrayani³

^{1,2,3}Sekolah Pascasarjana Magister Terapan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia
Correspondence Author: bonteselangit30@gmail.com

ABSTRACT

An integrated dynamic archiving information system aimed at managing electronic official documents within the Bekasi City Regional Secretariat was established in accordance with Bekasi Mayor Regulation Number 54 of 2023, which outlines the Guidelines for the Implementation of an Integrated Dynamic Archiving Information System for the Management of Electronic Official Documents in the Bekasi City Government. Management of Electronic Official Documents at the Bekasi City Regional Secretariat is carried out by all Office Holders and Policy Implementers within the Bekasi City Regional Secretariat. The reality that appears in the field is that there are still apparatus and office holders who do not understand the regulation massively, manual culture is still a pattern in the management of official documents, the standardization of the policy has not been determined so that it can be said that its implementation has not gone well. Therefore, the author wants to explore this topic further. This study uses descriptive using a qualitative approach. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. Data analysis methods consist of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The study findings show that the Implementation of the Policy on Guidelines for the Implementation of Integrated Dynamic Archiving Information Systems in the Efforts to Manage Electronic Official Manuscripts at the Bekasi City Regional Secretariat is not yet optimal, however, the author suggests that the solution that needs to be considered is Substantive Socialization to Officials and Implementers, Increasing the Capacity of Apparatus and Preparation of Standard Operating Procedures. In the future, it is hoped that this policy can be implemented in accordance with the provisions that apply to all Officials and Policy Implementers at the Bekasi City Regional Secretariat.

Keyword: *Policy Implementation, Electronic Official Document Management*

PENDAHULUAN

Sistem manajemen pemerintah saat ini yang di landaskan pada tatanan birokrasi yang kaku, merupakan sistem hirarki sektoral yang mengerucut dan berbelit. Dalam hak nya masyarakat menuntut pelayanan publik yang di perlukan secara cepat dan tepat sasaran. Menanggapi tantangan ini, baik pemerintah pusat maupun daerah perlu mengembangkan dimensi baru dalam organisasi, sistem manajemen, dan proses operasional mereka. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, belum sepenuhnya dan efektif dilaksanakan di sektor administrasi dan pelayanan publik. Penerapan sistem pemerintahan ini seharusnya berdampak pada peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Strategi untuk memajukan sistem pemerintahan elektronik memotivasi para pemimpin regional untuk menerapkan sistem ini selaras dengan tanggung jawab, peran, dan kekuasaan mereka, berdasarkan sumber daya yang tersedia yang mereka miliki, memastikan bahwa tata kelola terintegrasi

secara kohesif di tingkat nasional. Sistem pemerintahan berbasis elektronik merupakan pendekatan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan aparatur negara untuk menciptakan kerangka kerja yang lebih kompetitif, dengan harapan bahwa pemerintah telah berhasil mencapai integrasi sistem berbasis elektronik ini di tingkat pusat dan regional.

Skrip layanan elektronik berkaitan dengan data yang dihasilkan dan/atau diperoleh oleh personel dan pemimpin yang berwenang, didokumentasikan pada platform elektronik sebagai sarana komunikasi resmi. Dalam konteks ini, pengelolaan skrip layanan mencakup berbagai prosedur, termasuk penerimaan, penyimpanan, dan penunjukan ulang. Tujuan menyeluruh dari proses manajemen ini adalah untuk memastikan bahwa skrip layanan diatur secara sistematis, memungkinkannya untuk mudah diakses ketika diperlukan.

Pengarsipan adalah praktik merekam kegiatan atau acara dalam berbagai format dan media, selaras dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah diadopsi dan diintegrasikan oleh badan pemerintah, otoritas lokal, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, kelompok masyarakat, dan individu untuk kepentingan masyarakat, nasional, dan masalah negara. Tinjauan tata kelola dan kegiatan organisasi di samping meningkatnya utilitas organisasi atau lembaga menyoroti perlunya kontrol arsip yang efisien dan efektif dalam entitas tersebut. Manajemen arsip yang sistematis, sejalan dengan pedoman manajemen arsip yang ditetapkan, sangat penting; ini termasuk proses yang dimulai dengan pembuatan arsip, penggunaan, pemeliharaan, dan akhirnya, penghancurannya.

Kemajuan teknologi yang sedang berlangsung menghadirkan banyak tantangan bagi sumber daya manusia untuk mengimbangi perkembangan kontemporer dan memenuhi tujuan yang dimaksudkan. Pemerintah Daerah Kota Bekasi berkomitmen untuk menetapkan kebijakan yang dinilai sesuai dan efektif dilaksanakan dalam pengelolaan naskah dinas. Tentunya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan dan akan menimbulkan pro dan kontra dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Salah satu tahap penting dalam siklus kebijakan publik adalah pelaksanaan kebijakan. Seringkali, fase ini dipandang hanya sebagai pemberlakuan dari apa yang telah ditetapkan oleh legislatif atau pembuat keputusan, menunjukkan bahwa langkah-langkah ini memiliki sedikit arti penting. Namun demikian, kenyataannya adalah bahwa fase implementasi sangat penting karena kebijakan tidak ada gunanya jika tidak dapat dilakukan secara efisien dan akurat. Intinya, implementasi adalah fase di mana kebijakan diberlakukan secara maksimal, memungkinkannya untuk memenuhi tujuan yang dimaksudkan.

Ada banyak perspektif mengenai implementasi kebijakan yang diusulkan oleh berbagai ahli. Menurut definisi yang diberikan oleh kamus Webster, sebagaimana dirujuk oleh (Abdul Wahab, 2006) istilah implementasi dijelaskan dengan cara berikut: Gagasan implementasi berasal dari istilah bahasa Inggris, yaitu *Implement*. Menurut kamus Webster, *Implement* menandakan penyediaan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan tugas, serta fasilitasi dampak nyata pada masalah tertentu (Webster dalam Abdul Wahab (2006)).

Konsep implementasi, di samping definisi Webster yang disebutkan sebelumnya, dijelaskan lebih lanjut oleh Van Meter dan Van Horn, yang menggambarkan implementasi sebagai “langkah-langkah yang diambil oleh individu atau pejabat, serta entitas pemerintah atau swasta, dimaksudkan untuk memenuhi tujuan yang diuraikan dalam keputusan kebijakan” Van Meter dan Van Horn dalam (Abdul Wahab, 2006).

Perspektif lain diartikulasikan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier, yang menjabarkan konsep implementasi dengan menyatakan bahwa: Prinsip inti dari implementasi kebijakan terletak pada pemahaman tindakan selanjutnya setelah deklarasi atau perumusan program sebagai efektif. Pemahaman ini mencakup upaya untuk mengelolanya dan untuk menghasilkan pengaruh nyata pada masyarakat atau kejadian (Mazmanian dan Sabatier dalam (Widodo, 2010). Mengambil dari berbagai definisi yang diberikan oleh para ahli, peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi berkaitan dengan tindakan atau upaya yang dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan, dengan tujuan mencapai hasil yang selaras dengan tujuan atau tujuan kebijakan itu sendiri.

Model Implementasi Merille S.Grindle

Model implementasi kebijakan yang kemudian diusulkan oleh Grindle dipengaruhi oleh substansi kebijakan dan lingkungan di mana kebijakan itu dilaksanakan. Premis mendasar adalah bahwa kemanjuran implementasi kebijakan bergantung pada kelayakan kebijakan yang diaktualisasikan (Nugroho D, 2006). Menyatakan bahwa kemanjuran implementasi kebijakan dapat dievaluasi melalui dua kriteria utama:

- a) Mengevaluasi prosedur melibatkan penilaian apakah pelaksanaan kebijakan selaras dengan desain yang diuraikan dengan memeriksa tindakan kebijakannya.
- b) Menentukan apakah tujuan kebijakan terpenuhi. Aspek ini dinilai dengan mempertimbangkan dua faktor utama, khususnya:
 - 1) Pengaruh atau konsekuensi yang ditimbulkannya pada individu dan komunitas.
 - 2) Tingkat transformasi yang terjadi, bersama dengan penerimaan audiens target dan modifikasi yang muncul.

Efektivitas implementasi kebijakan secara signifikan dipengaruhi oleh kelayakan kebijakan itu sendiri, yang mencakup Konten Kebijakan dan Konteks Kebijakan, seperti dicatat oleh dalam (Agustino, 2006).

- a) *Content of Policy*
 - 1) Mempengaruhi kepentingan, berkaitan dengan berbagai faktor yang berdampak pada pelaksanaan suatu kebijakan, indikator ini menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan secara inheren melibatkan berbagai kepentingan, dan sejauh kepentingan ini memberikan pengaruh atas implementasinya.
 - 2) Jenis manfaat yang bisa didapatkan. Dalam konteks ini, Konten Kebijakan bertujuan untuk menggambarkan atau mengklarifikasi bahwa kebijakan harus mencakup manfaat spesifik yang menggambarkan hasil yang menguntungkan yang timbul dari pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan.
 - 3) Tingkat transformasi yang dimaksudkan untuk direalisasikan. Setiap kebijakan dirancang dengan tujuan tertentu dalam pikiran. Aspek ini bertujuan untuk menentukan bahwa tingkat perubahan yang diantisipasi atau dicari melalui pelaksanaan kebijakan harus ditentukan oleh kriteria yang tepat.
 - 4) Lokasi pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dalam kebijakan secara signifikan mempengaruhi pelaksanaannya, oleh karena itu bagian ini harus menentukan lokasi di mana pengambilan keputusan untuk suatu kebijakan akan terjadi.

- 5) Pelaksana program. Keberhasilan implementasi kebijakan atau program bergantung pada pelaksana kebijakan yang efektif dan terampil, yang sangat penting untuk mencapai tujuan kebijakan.
 - 6) Sumber daya yang digunakan. Pelaksanaan kebijakan yang efektif juga membutuhkan sumber daya pendukung yang memadai untuk memastikan bahwa implementasi berjalan tanpa hambatan.
- b) *Context of Policy*
- 1) Dinamika, motivasi, dan inisiatif dari para pemangku kepentingan yang terlibat. Dalam konteks pembuatan kebijakan, penting untuk mempertimbangkan kemampuan atau pengaruh, motivasi, dan inisiatif yang digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan. Mengabaikan aspek ini dapat secara signifikan meningkatkan kemungkinan bahwa program yang akan dijalankan akan dipahami dengan buruk.
 - 2) Karakteristik lembaga dan badan pengatur. Konteks di mana kebijakan diberlakukan juga memainkan peran penting dalam efektivitasnya, oleh karena itu dalam bagian ini kami berupaya untuk menguraikan atribut lembaga yang akan membantu keberhasilan implementasi kebijakan.
 - 3) Tingkat kepatuhan dan reaksi dari pelaksana. Faktor kunci dalam pelaksanaan kebijakan adalah kepatuhan dan reaksi dari mereka yang bertanggung jawab untuk implementasi. Oleh karena itu, bagian ini harus mengklarifikasi tingkat kepatuhan dan tanggapan dari pelaksana mengenai kebijakan tersebut.

Pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh isinya bersama dengan lingkungan sekitar atau konteks di mana kebijakan itu diterapkan, ini memungkinkan untuk penilaian apakah pelaksana kebijakan selaras dengan hasil yang diantisipasi. Selain itu, dapat ditentukan apakah kebijakan dibentuk oleh lingkungannya, sehingga menunjukkan sejauh mana perubahan yang diharapkan yang mungkin timbul.

Model Implementasi Mazmanian Dan Sabatier

Model implementasi Mazmanian dan Sabatier mengenai implementasi kebijakan publik diakui sebagai Kerangka Kerja untuk Analisis Implementasi. Dalam analisis mereka, Mazmanian dan Sabatier menggambarkan proses implementasi kebijakan menjadi tiga variabel (Nugroho, 2003):

- a) Variabel Independen mengacu pada ada atau kurangnya masalah yang dapat dikelola mengenai indikator yang terkait dengan tantangan teoritis dan teknis dalam pelaksanaan, berbagai subjek yang terlibat, dan setiap perubahan yang dicari.
- b) Variabel Intervening, yang mengacu pada kapasitas kebijakan untuk mempengaruhi proses implementasi, mencakup indikator seperti kejelasan dan konsistensi tujuan, relevansi teori kausal, akurasi dalam distribusi sumber pendanaan, keselarasan hierarkis di antara lembaga yang terlibat dalam implementasi, aturan operasional lembaga tersebut, perekrutan pejabat pelaksana, dan kesiapan untuk memasukkan orang luar. Faktor-faktor di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi dikaitkan dengan indikator yang terkait dengan konteks sosial ekonomi dan teknologi, dukungan publik, persepsi dan sikap konstituen mengenai risiko, dukungan dari pejabat senior, dan karakteristik komitmen dan kepemimpinan yang ditunjukkan oleh pejabat yang ditugaskan untuk implementasi.

- c) Variabel dependen mengacu pada tahapan yang terlibat dalam proses implementasi, yang terdiri dari lima fase berbeda: pemahaman lembaga atau badan pelaksana, dimanifestasikan dalam perumusan kebijakan pelaksana, kepatuhan kelompok sasaran, hasil konkret yang dicapai, pengakuan hasil actual, dan pada akhirnya, ini mengarah pada revisi kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau perombakan seluruh kebijakan yang secara fundamental signifikan.

METODE PENELITIAN

Studi ini melibatkan eksplorasi sistematis untuk mengungkap dan berbagi kebenaran dalam jangka waktu tertentu, memanfaatkan teknik ilmiah yang mematuhi pedoman yang relevan untuk memenuhi tujuan penelitian. Dalam melakukan penelitian, penting untuk memiliki desain penelitian yang selaras dengan keadaan spesifik dari pengaturan penelitian untuk menerapkan metode ilmiah dan prosedur penelitian secara efektif.

Menurut Nurdin & Hartati (2019): Desain penelitian berfungsi sebagai cetak biru terstruktur untuk melakukan penelitian. Ini menawarkan garis besar metodologi yang komprehensif untuk mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan untuk secara efektif menjawab seluruh pertanyaan penelitian. Akibatnya, studi yang dilakukan dengan cermat akan mengarah pada proses penelitian yang bermanfaat dan efisien.

Suchman dalam Nazir (2013) mengemukakan ciri-ciri desain yang ideal yaitu: 1) Didirikan atas dasar metode ilmiah. 2) Ini dapat diterapkan menggunakan data dan metodologi saat ini. 3) Sesuai untuk tujuan penelitian, karena harus memastikan integritas temuan untuk mengatasi masalah tersebut. 4) Harus ada kreativitas dalam mengembangkan desain yang memiliki esensi inovatif. 5) Ada kualitas estetika pada desain, karena menjaga keseimbangan. 6) Desain harus selaras dengan anggaran penelitian dan kemampuan sumber daya manusia.

Dalam studi ini, peneliti menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan perspektif kualitatif. Menurut (Nazir, 2011:54); Metode deskriptif melibatkan analisis situasi saat ini dari sekelompok individu, objek, serangkaian kondisi, proses berpikir, atau kategori kejadian. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk menciptakan penggambaran, ilustrasi, atau representasi yang terstruktur, akurat, dan terperinci dari fakta, atribut, dan koneksi di antara fenomena yang sedang diperiksa. Narbuko & Achmadi (2013) menyatakan pendekatan deskriptif sebagai jenis penelitian yang bertujuan menjelaskan solusi untuk masalah saat ini melalui penggunaan data, yang juga melibatkan penyajian, analisis, dan interpretasi data tersebut. Dengan menggunakan metode analitik deskriptif, peneliti dapat mengumpulkan, memeriksa, dan mengkomunikasikan fenomena yang diamati selama studi mereka.

Penelitian kualitatif, sebagaimana didefinisikan oleh Moleong (2012: 4) adalah penyelidikan yang berusaha untuk secara komprehensif memahami pengalaman hidup peserta penelitian, mencakup aspek-aspek seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, antara lain, secara holistik dan deskriptif menggunakan ekspresi linguistik, terletak dalam konteks alami tertentu, sambil memanfaatkan serangkaian metodologi naturalistik. Menurut Walidin dalam Fadli (2021:35) penelitian kualitatif merupakan pendekatan metodologis yang bertujuan untuk memahami fenomena manusia atau sosial secara komprehensif. Hal ini dicapai dengan membangun representasi terperinci dan rumit yang dapat

disampaikan secara efektif melalui deskripsi verbal, memberikan penjelasan mendalam tentang perspektif yang dikumpulkan dari sumber-sumber informan, dan dilakukan dalam konteks alami

Berdasarkan wawasan yang diberikan oleh para ahli tersebut, para peneliti menentukan bahwa metode penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif adalah teknik investigasi yang secara menyeluruh memeriksa masalah tertentu dari kumpulan data dengan menganalisis peristiwa atau fenomena terkait untuk membantu dalam menjelaskan dan mengkarakterisasi subjek penyelidikan.

Studi ini berupaya memberikan analisis deskriptif melalui kerangka kualitatif, yang bertujuan untuk secara menyeluruh mengeksplorasi, menyelidiki, menilai, dan menjelaskan dinamika seputar Implementasi Kebijakan Tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Dalam Upaya Pengelolaan Naskah Dinas Elektronik di Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Dalam Upaya Pengelolaan Naskah Dinas Elektronik di Sekretariat Daerah Kota Bekasi melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan pada perangkat daerah di Kota Bekasi. Pendekatan penyelenggaraan arsip didasarkan pada tanggung jawab dan peran utama Sekretariat Daerah Kota Bekasi. Karena tugas utama melibatkan para pemimpin regional, yang terlibat dalam menciptakan kebijakan, mengelola tata kelola organisasi, dan administrasi secara keseluruhan; dengan demikian, posisi Sekretaris Daerah meliputi mendukung Walikota dalam merumuskan kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan administratif tugas yang diberikan kepada Perangkat Daerah, bersama dengan layanan administrasi yang mencakup domain pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan administrasi umum.

Komunikasi

Transformasi

Pelaksanaan kebijakan harus didukung dengan komunikasi yang baik dan disampaikan kepada sasarannya, didukung dengan pendapat yang di kemukakan oleh Widodo (2021:97) “Menghendaki agar kebijakan 115ias115f disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung”.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis melalui kanal youtube pada kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi dalam sosialisasi kebijakan penggunaan srikandi dalam upaya pengelolaan naskah dinas elektronik bahwa dalam hal komunikasi sudah di laksanakan secara menyeluruh kepada Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Kota Bekasi. Kondisi ini di dukung dengan di lakukannya wawancara penulis kepada Pj. Wali Kota Bekasi Bapak R. Gani Muhamad pada tanggal 24 Juli 2024 di Ruang Wali Kota Bekasi yang mengemukakan:

“Pemerintah Kota Bekasi sedang sedikit semakin sedikit memperbaiki membenahi sistem pemerintahannya dalam mendukung program pemerintah pusat yaitu mengintegrasikan aplikasi antara daerah dan pusat, dalam kaitannya ini pemerintah kota Bekasi mengadopsi sistem informasi kearsipan dinamis teintegrasi sebagai salah satu sistem penyelenggaraan pemerintahan di bidang kearsipan dan dengan cepat dan tepat di sosialisasi kepada aparatur di lingkup pemerintah kota 115ias115f, selain itu kami beserta jajaran akan terus melakukan

penekanan terhadap perangkat daerah terkait pentingnya pengelolaan naskah dinas secara elektronik”.

Dari hasil observasi dan wawancara di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa terdapat proses penyampaian informasi sudah tersampaikan hingga kepada pihak yang berkepentingan. Pada kondisi idealnya Kepala Perangkat Daerah mempunyai tanggung jawab dalam menyampaikan kebijakan kepada pihak yang berkepentingan yang agar organisasi tetap berjalan secara efektif.

Kejelasan

Dalam penelitian ini diperlukan proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan hingga pelaksana kebijakan dengan tujuan agar memahami alur dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Seperti apa yang dikemukakan Edward III dalam Widodo (2021:97) berpendapat bahwa “Menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud”.

Menurut wawancara dengan Sekretaris Daerah pada tanggal 29 Juli 2024 Kota Bekasi Bapak Drs. Junaedi, yang mengatakan bahwa:

“Proses penyampaian informasi di Perangkat Daerah Sekretariat Daerah dalam hal ini sudah melakukan langkah langkah untuk menyampaikan perwal 54 tahun 2023 melalui bagian tata usaha sebagai *leading sector* kepada seluruh unsur yang berada di lingkup 116ias116f116or116t daerah akan tetapi dalam penjabaran masih terdapat ketidakharmonisasian antara para pemangku jabatan akhirnya yang mengakibatkan kembali kepada budaya kerja manual”.

Berdasarkan keterangan wawancara di atas timbul fenomena permasalahan yang terjadi pada 116ias116f116or kejelasan, dapat disampaikan dari ketidaksesuaian informasi yang di terima para pemangku jabatan secara 116ias116f yang berada pada unit kerja yang berdampak lebih mengedepankan budaya kerja manual di lingkungan unit kerjanya.

Dikuatkannya fenomena permasalahan ini sesuai dengan wawawancara penulis dengan Ibu Dwi Melasari Pengelola Surat di Lingkup Bagian pada tanggal 15 Agustus 2024, yang mengemukakan bahwa:

“Pelaksanaan penggunaan sistem tersebut di kami masih di rasakan kurang karena belum yang mau beradaptasi dari manual tetapi ada beberapa aparatur yang menggunakan aplikasi tersebut. Kondisi saat ini para pemangku jabatan belum ada yang mengarahkan untuk ke sistem tersebut tetapi tidak juga melarang penggunaan tersebut. Jadi melakukan manual juga secara elektronik”.

Berdasarkan hasil wawancara di sampaikan, dapat di simpulkan bahwa proses penyampaian informasi sudah di distribusi hingga para pemangku jabatan di Sekretariat Daerah Kota Bekasi akan tetapi belum optimal dikarenakan masih terdistorsikannya informasi sehingga kebijakan belum jelas dan belum sesuai jalur dari kebijakan tersebut.

Sumber Daya

Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, mencakup tujuan, sasaran, dan substansi kebijakan. Bahkan jika elemen-elemen ini telah diartikulasikan dengan jelas dan konsisten, kurangnya sumber daya untuk pelaksana akan menghambat keberhasilan eksekusi. Sumber daya penting yang penting untuk melaksanakan kebijakan ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, personel, aset keuangan, dan fasilitas infrastruktur.

Sumber Daya Manusia

Istilah sumber daya berkaitan dengan kebutuhan bahwa setiap kebijakan membutuhkan dukungan yang memadai, yang mencakup distribusi personel dan aset keuangan. Sumber daya manusia berkaitan dengan kompetensi pelaksana, yang mungkin melibatkan penilaian kualitas dan kuantitas pelaksana yang dapat mencakup seluruh audiens yang dituju. Seperti apa yang di sampaikan Edward III dalam Widodo (2021:98) “Manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan”

Hal ini dijelaskan Pj. Wali Kota Bekasi Bapak R.Gani Muhamad pada tanggal 24 Juli 2024 di Ruangan Wali Kota Bekasi, yang berpendapat bahwa :

“Pemerintah kota bekasi dituntut untuk melakukan percepatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang tepat dan mudah, disamping itu harus didukung dengan aparatur yang cepat menyesuaikan sesuai keadaan, akan tetapi dalam suatu kebijakan menimbulkan pro kontra dilapangan begitu juga dengan ekosistem pendukung aparatur tersebut yang kemudian akan dilaksanakan aparatur sebagai penyelenggara”.

Pada kondisi idealnya kualitas sumber daya manusia memegang peranan yang penting baik secara administratif maupun teknis. Peneliti melakukan observasi kepada pengelola surat dilingkup bagian sebagai berikut: Hasil observasi yang dilakukan membuahkan kesimpulan sementara yang berkembang masih terdapat aparatur yang dinilai masih belum optimal dalam penggunaannya di karenakan sudah nyaman dalam penggunaan aplikasi *E-Office* yang sejak dahulu sudah di gunakan sebelum adanya launching penggunaan aplikasi srikandi. Didukung dengan kualitas pendidikan sumber daya manusia yang dinilai belum semua sesuai dengan yang diharapkan dalam mendorong penggunaan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi. Hal ini di kembangkan dalam wawancara kepada Kepala Bagian Tata Usaha Bapak Zalaludin, S.Sos., M.M pada tanggal 23 Juli 2024, yang mengatakan bahwa:

“Sosialisasi yang sudah dilaksanakan bagian tata usaha yang mengundang beberapa perwakilan operator di lingkup bagian, hingga saat ini saya masih menerima beberapa keluhan terkait tidak sinkron nya informasi untuk penggunaan jenis/pengelompokan surat mana yang di gunakan secara elektronik”.

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, dapat di simpulkan belum optimalnya sumber daya manusia di level pelaksana dikarenakan masih ditemukan beberapa aparatur yang kompetensi dinilai kurang dari yang di harapkan untuk mendukung proses pengelolaan naskah dinas secara elektronik.

Sumber Daya Anggaran

Anggaran merupakan elemen penting dalam menyediakan sarana dan infrastruktur yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan mengenai pedoman pembentukan sistem informasi arsip dinamis terintegrasi, yang bertujuan untuk mengelola dokumentasi layanan elektronik secara efektif di Sekretariat Daerah Kota Bekasi. Apabila dikaitkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2023 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah Kota Bekasi. Menurut Edward III dalam Widodo (2021:100) “Sumber daya yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan, selain sumber daya

manusia adalah dana (anggaran) dan peralatan yang diperlukan untuk membiayai operasional pelaksanaan kebijakan”.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Sekretaris Daerah Bapak Drs. Junaedi pada tanggal 29 Juli 2024, yang mengatakan bahwa :

“Tingkat pemahaman aparatur yang menjadi pengelola pelaksana naskah dinas elektronik sudah lumayan baik, karena sudah mengikuti sosialisasi yang di laksanakan bagian tata usaha sebagai *leading sector* di dukung dengan *backgorund* pendidikan aparatur yang ada di sekretariat daerah yang sudah berijazah S1 dapat di simpulkan sudah sadar penggunaan akan penggunaan teknologi. Akan Tetapi Penyiapan sumber daya manusia sebagai fasilitator atau pelaksana penerapan pengelolaan naskah dinas elektronik masih di nilai kurang. Sehingga budaya kerja manual seperti di terapkan kembali sebelum ada sebelum adanya *E-Office*, Beserta Belum terdukungnya operasional pendukung sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi seperti, penambahan jaringan wifi, dan komputer sesuai kebutuhan berbicara anggaran saya kira sudah mendukung”

Dari hasil wawancara yang dilaksanakan penulis, dapat di simpulkan proses dukungan sumber daya anggaran di nilai sudah mendukung dalam penerapan pengelolaan naskah dinas secara elektronik ini atau operasional dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Disposisi

Pola perilaku eksekutif kebijakan dicirikan oleh penerimaan atau penolakan mereka terhadap upaya pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tertentu. Hal ini merupakan faktor penting dalam menentukan apakah kebijakan sistem informasi pengarsipan dinamis terintegrasi berhasil atau gagal dalam Sekretariat Daerah Kota Bekasi. Tanggapan pelaksana terhadap kebijakan mencakup tiga elemen kunci: perspektif mereka tentang kebijakan, kesadaran dan pemahaman mereka tentang kebijakan, dan tingkat kecenderungan pelaksana.

Edward III dalam Widodo (2021:104) “Menekankan bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan tidak hanya bergantung pada pengetahuan dan kemampuan pelaksana tetapi juga secara signifikan pada komitmen pembuat kebijakan untuk secara aktif mendukung kebijakan yang dipraktikkan”. Kecenderungan pelaksana mengenai ukuran dan tujuan dasar memiliki signifikansi yang signifikan. Para pelaksana mungkin berjuang untuk melaksanakan kebijakan secara efektif jika mereka mengabaikan tujuan yang diuraikan dalam kebijakan tersebut. Akibatnya, kebalikannya juga benar. Widodo (2021:104) “Menegaskan bahwa “Disposisi mengacu pada tekad, aspirasi, dan kecenderungan pembuat kebijakan untuk rajin menerapkan kebijakan, memastikan bahwa tujuan kebijakan tercapai”.

Ada tiga kategori berbeda dari faktor respons yang berpotensi mempengaruhi penilaian dan kesiapan untuk pelaksanaan kebijakan, yang terdiri dari:

Pengetahuan, Pemahaman dan Pendalaman Kebijakan

Pada tahapan ini pemangku jabatan mempunyai indikator keberhasilan tentang bagaimana para pelaku kebijakan memahami kebijakan tersebut. Seperti apa yang disampaikan Edward III dalam Widodo (2021:104) “Respon pelaksana merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti kepada salah satu aparaturnya pelaksana yang ada pada lingkup Bagian menerangkan bahwa aparaturnya mempunyai sistem hierarki dalam pelaksanaan tugas dalam pengertian adanya hubungan timbal balik yang dilakukan pemangku jabatan kepada pelaksana kebijakan. Pada kondisi idealnya pemangku jabatan mempunyai pendidikan dan pelatihan teknis tentang bagaimana pemerintahan bertransformasi ke arah yang lebih efektif dan efisien.

Hal serupa didukung dengan pernyataan wawancara Sekretaris Daerah Kota Bekasi Bapak Drs. Junaedi, pada tanggal 29 Juli 2024, yang menyatakan bahwa:

“Arahan saya sebagai asisten dan kepala bagian sudah jelas untuk menggunakan pengelolaan sistem tersebut kepada lingkup para asisten dan kepala bagian di lingkup sekretariat daerah, tapi masih terdapat beberapa pemangku jabatan yang tidak mengindahkan sistem tersebut padahal hal tersebut dinilai efisien dan efektif”.

Pada kesempatan lain penulis melakukan wawancara kepada Pengelola Surat di lingkup Bagian, Ibu Dwi Melasari pada tanggal 15 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa :

“Pelaksanaan penggunaan sistem tersebut di kami masih dirasakan kurang karena belum yang mau beradaptasi dari manual”.

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan terdapat permasalahan yang terjadi pada tahap ini. Yang seyogyanya para pemangku jabatan mempunyai kemampuan manajerial yang dinilai cukup untuk menerapkan kebijakan penerapan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi dalam upaya pengelolaan naskah dinas elektronik di lingkup unit kerjanya, sebaliknya para pelaksana kebijakan tersebut belum menerima arahan yang jelas dalam pengelolaan naskah dinas elektronik pada unit kerjanya.

Struktur Birokrasi Fragmentasi

Dalam melihat karakteristik perangkat daerah, seperti dinyatakan oleh George Edward III dalam (Widodo, 2021:106), efektivitas implementasi kebijakan mungkin masih terganggu karena inefisiensi yang melekat dalam kerangka birokrasi (Kekurangan dalam struktur birokrasi). Kerangka kerja organisasi ini mencakup berbagai elemen, termasuk tata letak organisasi, pendelegasian distribusi otoritas, keterkaitan antara divisi organisasi yang sudah ada sebelumnya dalam organisasi subjek, dan afiliasi dengan entitas eksternal, di antara faktor-faktor lainnya. Akibatnya, kerangka birokrasi terdiri dari dimensi fragmentasi dan Prosedur Operasi Standar, yang berfungsi untuk memfasilitasi dan menyelaraskan tindakan pembuat kebijakan dalam melaksanakan tanggung jawab mereka.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis dapat digambarkan dari struktur organisasi tersebut telah sesuai dengan amanat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang penyederhanaan birokrasi, hierarki terlihat sederhana untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efisien dan profesional. Perubahan tatanan dari sebelumnya bersifat berjenjang menjadi lebih sederhana dengan mengutamakan kerja sama tim yang berorientasi pada *Output*. Dengan struktur organisasi yang hierarkinya tidak terlalu banyak, diharapkan aparaturnya dapat bekerja lebih cepat sesuai dengan dengan normatif. Hal ini sesuai dengan hasil observasi, para pemangku jabatan saling mendukung dalam pelaksanaan penerapan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

Hal ini didukung dengan pernyataan Arsiparis Ahli Muda Ibu Nunik Agustin pada tanggal yang menyatakan:

“Pandangan saya, keadaan saat ini dengan lahirnya permenpan yang baru tentang penyetaraan jabatan seharusnya jalur koordinasi yang di lakukan haruslah lebih flexibel, seharusnya juga lebih mudah untuk mendukung penggunaan srikandi ini di sekretariat daerah”.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang di lakukan penulis dapat disimpulkan bahwa pada indikator fragmentasi dinilai sudah baik sesuai dengan ketentuan yang Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

Standar Operasional Prosedur

Salah satu elemen kunci dalam mencapai sistem birokrasi yang mahir, manjur, dan efisien adalah penerapan Standar Operasional Prosedur di seluruh kontinum administrasi. Setelah perumusan Standar Operasional Prosedur, koordinator administrasi dimungkinkan untuk maju dengan pasti. Berbagai bentuk penyimpangan dapat dicegah, dan jika penyimpangan memang terjadi dalam kerangka pemerintahan, penyebabnya dapat diidentifikasi dan ditangani dengan tepat. Ketika semua kegiatan dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, pengelolaan naskah layanan, yang menjadi fokus studi ini, secara bertahap akan menjadi lebih profesional, cepat, dan efisien. Berdasarkan hasil Observasi yang di lakukan peneliti pada saat ini masih menggunakan Standar Operasional Prosedur berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bekasi Nomor 067/Kep. 148-SETDA.TU/IX/2019 Tentang Standar Operasional Prosedur yang artinya proses pengeloan naskah dinas masih dilakukan secara secara berjenjang dan manual.

Hal ini didukung dengan wawancara dengan Analis SDM Aparatur Ahli Muda Ibu Haironi, S.E., M.Si pada tanggal 1 Agustus 2024, yang menyatakan bahwa:

“Selaku koordinator administrasi umum dan kepegawaian yang mendapat arahan dari kepala bagian tata usaha kami sudah menginformasikan terhadap seluruh aparatur baik pengaku jabatan hingga pelaksana di lingkup bagian melalui sosialisasi yang di laksanakan pada lingkup Sekretariat Daerah. Pada saat ini kita belum di ada SOP terkait penggunaan naskah dinas elektronik ini”.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Daerah belum menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur untuk pelaksanaan penerapan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi.

PENUTUP

Berlandaskan temuan dan pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Tentang Pedoman Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang ditujukan untuk upaya pengelolaan naskah dinas elektronik di Sekretariat Daerah Kota Bekasi, sebagaimana diuraikan, dapat disimpulkan bahwa: 1) Pada dimensi komunikasi dengan indikator kejelasan dinilai belum berjalan dengan optimal dikarenakan di Sekretariat Daerah Kota Bekasi masih terdistorsikannya informasi sehingga kebijakan belum jelas dan belum sesuai jalur dari kebijakan tersebut; 2) Pada Dimensi Sumber Daya dengan Indikator Sumber daya Manusia belum optimalnya sumber daya manusia di level pelaksana dikarenakan

masih ditemukan beberapa aparatur yang kompetensi dinilai kurang dari yang di harapkan untuk mendukung proses pengelolaan naskah dinas secara elektronik; 3) Pada Dimensi Sumber Daya dengan Indikator Sumber Daya Peralatan terdapat pengembangan fenomena yang terjadi di selama penulis melakukan penelitian yaitu masih terdapat beberapa fasilitas komputer yang dinilai 60 PC dengan kondisi cukup dan Intenet yang hanya 2 bandwidth di nilai belum mendukung sesuai kebutuhan dalam penerapan pengelolaan naskah dinas secara elektronik; 4) Pada dimesi Struktur Birokrasi dalam indikator Standar Operasional Prosedur menyimpulkan hambatan yaitu belum terbentuknya standar operasional prosedur yang pengelolaan naskah dinas elektronik pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, S. (2006). *Analisis Kebijakan ; Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara.
- Abrizal Hasan Ritonga. (2023). Implementasi Kebijakan Aplikasi Srikandi Dalam pengelolaan Arsip Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara. Http://Eprints.Ipdn.Ac.Id/16188/1/30%2C0067_B6_abrizal%20hasan%20ritonga.Pdf.
- Agustino, L. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Cetakan Pertama). Alfabeta.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. PT Rineka Cipta.
- AYANG ADRA. (2023). *Pemanfaatan Aplikasi Srikandi Bagi Pegawai Di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi* [Skripsi]. Universitas Negeri Padang.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *HUMANIKA*, 21(1), 33-54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Irawan, P. (2007). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Zifatama.
- Kurnia, M. D. (2023). *Analisis Pengelolaan Arsip Di Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong*. [Skripsi]. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Harper Collins.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Ed revisi ; Cet. 38). PT Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2013). *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara.
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian* (R. Siskumbang, Ed.). Ghalia Indonesia.
- Nazir, Moh. (2011). *Metode penelitian* (7th ed.). Ghalia Indonesia.
- Ndraha, T. (2003). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) I*. PT. Rineka Cipta.
- Nugroho D, R. (2006). *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Elex Media Komputindo.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia.
- Setiadi. (2013). *Konsep dan Praktik Penulisan Riset Keperawatan Ed.2* (Ed. 2). Graha Ilmu.
- Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial* (Aep Gunarsa, Ed.). Refika Aditama.
- Simangunsong. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Sudijono, A. (2011). *Evaluasi Pendidikan*. Raja Grafindo Persada.

- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian dan Pengembangan: Research and Development untuk bidang pendidikan, manajemen, sosial teknik*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2007). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Sukmana, E. (2006). *Digitalisasi Pustaka* [Seminar]. Institut Teknologi Bandung.
- Syafiie, I. K. (2011). *Sistem pemerintahan Indonesia* (Ed. rev., cet. 1.). Rineka Cipta.
- Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Bayumedia.
- Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bayu Media.